

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis terhadap pelaksanaan *e-Purchasing* melalui sistem e-Katalog pada pengadaan pekerjaan konstruksi di 13 OPD Provinsi Sumatera Barat, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut.

1. Implementasi *e-Purchasing* melalui e-Katalog pada pengadaan konstruksi di Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Berdasarkan penilaian PPK, seluruh variabel penelitian, yaitu efektivitas (3,03), efisiensi (3,11), transparansi (3,01) dan persaingan usaha (3,05) berada pada kategori baik. Penilaian kontraktor juga menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori baik, dengan nilai efektivitas (3,18), efisiensi (3,18), transparansi (3,19) dan persaingan usaha (3,18). Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-purchasing* melalui e-Katalog telah mampu mendukung proses pengadaan konstruksi yang efektif, efisien, transparansi serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selain itu, kontraktor memberikan penilaian yang lebih tinggi dari PPK, sehingga mengindikasikan adanya perbedaan persepsi terhadap kualitas implementasi meskipun kedua kelompok sama – sama menilai bahwa *e-purchasing* telah berjalan dengan baik.
2. Penerapan e-Katalog dalam pengadaan pekerjaan konstruksi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dari perspektif PPK, kendala utama berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan keterbatasan fitur sistem, sedangkan dari sisi kontraktor lebih pada kurangnya sosialisasi serta lamanya proses kurasi dan verifikasi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa hambatan implementasi e-Katalog tidak hanya terletak pada aspek sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem pengadaan secara menyeluruh.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan analisa data penelitian, beberapa saran perbaikan sistem e-Katalog dalam pengadaan konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan fitur sistem e-Katalog perlu dilakukan, khususnya pada penyajian spesifikasi teknis yang lebih detail dan fleksibel sesuai karakteristik pekerjaan konstruksi. Selain itu, perlu dikembangkan fitur negosiasi teknis yang lebih interaktif antara PPK dan penyedia, serta sistem pengelolaan harga yang adaptif terhadap kondisi lapangan.
2. Penguatan integrasi sistem antar platform pengadaan, seperti e-Katalog dengan SPSE/LPSE dan sistem perencanaan (SIRUP), perlu ditingkatkan untuk menciptakan alur pengadaan yang lebih terintegrasi, mengurangi duplikasi data, serta meningkatkan efisiensi proses administrasi secara digital.
3. Perbaikan sistem kurasi dan verifikasi penyedia perlu dilakukan dengan mempercepat proses evaluasi, meningkatkan transparansi tahapan kurasi, serta menyediakan notifikasi dan tracking proses secara real-time bagi penyedia.
4. Pengembangan sistem pendukung pengguna (user support system) seperti panduan teknis interaktif, helpdesk digital, dan dashboard monitoring perlu ditingkatkan untuk membantu PPK dan kontraktor dalam memahami serta mengoptimalkan penggunaan e-Katalog.
5. Peningkatan kualitas data dan tampilan informasi dalam e-Katalog perlu dilakukan agar informasi harga, spesifikasi, dan ketersediaan produk/jasa lebih akurat, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan secara langsung oleh pengguna.

5.3. Implikasi Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian e-procurement di sektor publik, khususnya dalam konteks pengadaan konstruksi di lingkungan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-Purchasing tidak semata-mata ditentukan oleh

ketersediaan sistem elektronik, melainkan juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Temuan tersebut turut memperkuat perspektif teoritis yang memandang e-procurement sebagai suatu sistem sosio-teknis, di mana faktor teknologi dan faktor organisasi saling berinteraksi dalam menentukan kinerja pengadaan publik secara keseluruhan.

5.4. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik quota sampling, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif, sehingga belum menguji hubungan kausal antarvariabel yang diteliti. Ketiga, data penelitian bersumber dari persepsi responden, yang berpotensi mengandung unsur bias subjektivitas.

